

# **RENCANA KERJA**

**DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL**

**TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

## KATA PENGANTAR

Dengan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep telah dapat menyajikan Rencana Kerja Tahun 2024 yang telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya laporan ini disusun untuk dapat memberikan gambaran tentang Rencana Kerja Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dilakukan pada sekaligus sebagai bahan menyusun langkah-langkah kebijakan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di era Otonomi Daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan berpedoman dari hasil yang telah dicapai serta mengkaji dari adanya permasalahan dan bentuk-bentuk solusi yang dapat dilakukan, maka diharapkan pelaksanaan pembangunan di urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dapat semakin meningkat.

Semoga Laporan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat serta memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah di urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Sumenep, 2023  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP

**Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19570303 198809 1 001

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

#### **1.1.1. Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah.**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah salah satu dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renja digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

#### **1.1.2. Fungsi Renja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan perangkat daerah yang berfungsi sebagai formulasi arah pembangunan satu tahun kedepan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang disajikan dalam bentuk program dan kegiatan disertai target akhir tahun.

#### **1.1.3. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setidaknya melalui 3 tahap utama yaitu :

a. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disusun bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD. Selanjutnya Rancangan Awal Renja disinkronkan dengan Rancangan Awal RKPD.

b. Perumusan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disinkronkan dengan hasil Musyawarah pembangunan daerah RKPD serta Peraturan Bupati Sumenep tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

c. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan bahan penerbitan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang sebelumnya telah dilakukan verifikasi oleh BAPPEDA untuk memastikan sinkronisasinya dengan Peraturan Bupati tentang RKPD sehingga terbentuklah Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

1.1.4. Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sumenep dan rencana kerja Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

a. Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Sumenep sehingga RKPD dijabarkan dalam kegiatan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Keterkaitan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Secara teknis terdapat keterkaitan erat antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga perlu adanya sinkronisasi antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Renja Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama terkait program

prioritas nasional harus dipastikan juga diakomodir dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

- d. Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Secara teknis terdapat keterkaitan erat antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sehingga perlu adanya sinkronisasi antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur terutama terkait program prioritas harus dipastikan juga diakomodir dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

- d. Tindak lanjut penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Peraturan Bupati Sumenep tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terutama terkait kegiatan dan pagu anggaran.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75) Pasal 18;

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

- i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- j. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- k. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- m. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- n. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- o. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- p. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa I-5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



- x. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- y. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- z. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- aa. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- bb. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- cc. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- dd. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- ff. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
- gg. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

- hh. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
- jj. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan Dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
- kk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- ll. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- mm. Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/11/2012 Nomor : SE-33/MK.02/2012 Nomor : 050/4379a/Sj Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG)

melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

- nn. Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/Kota oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas;
- oo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Tahun 2005-2025;
- pp. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2011—2031;
- qq. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
- rr. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- ss. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
- tt. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
- uu. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep

Tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 6);

- vv. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026;
- ww. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam satu tahun ke depan.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini meliputi 5 bab yaitu :

#### **I. PENDAHULUAN**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, fungsi Renja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD, Renja Kementerian dan Renja perangkat daerah provinsi Jawa Timur serta tindak lanjut penyusunan RAPBD. Selain itu juga menjelaskan tentang

landasan hukum serta maksud dan tujuan penyusunan Renja serta sistematika penulisan

II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menyajikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan telaahan terhadap kebijakan nasional dan regional, tujuan dan sasaran rencana kerja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menyajikan daftar kegiatan dan pagu indikatif untuk satu tahun ke depan

V. PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah memiliki tugas untuk menjalankan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pada Tahun Anggaran 2022 urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh anggaran sebesar Rp. 11.673.801.875,- Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Pagu Anggaran Program/Kegiatan**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	9.220.833.773	Dinas Kependudukan & Pencapil
2	Program pendaftaran penduduk	2.268.852.702	
3	Program pencatatan sipil	89.972.200	
4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	94.143.200	

**2.1.1 Realisasi anggaran perangkat daerah Tahun 2022**

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	8.148.944.856	Dinas Kependudukan & Pencapil
2	Program pendaftaran penduduk	2.211.765.750	
3	Program pencatatan sipil	87.466.220	
4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	42.383.750	

### 2.1.2 Capaian Indikator Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022

Capaian indikator kinerja perangkat daerah didasarkan pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016– 2021;
5. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2026;
6. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.

Capaian indikator perangkat daerah meliputi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel. 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	nilai	A	A	A
2	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	Nilai IKM Layanan Kependudukan	%	83	87	104
	2.1 Terlayaninya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	77	75	97
		2.1.1 Kepemilikan KK	%	100	100	100
		2.1.2 Perekaman KTP el	%	92	91	98
	2.2 Terlayaninya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	2.1.3 Kepemilikan KIA	%	40	33	82
		Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	79	94	119
		2.2.1 Kepemilikan akta kelahiran 0- 18 thn	%	97	99	102
		2.2.2 Kepemilikan akta kematian	%	40	82	205
		2.2.3 Kepemilikan Akta perkawinan	%	100	100	100
	2.3 Terlayaninya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan yang dikelola dengan baik				
		2.3.1 Pejanjian Kerjasama dengan Lembaga Pemanfaatan Data	lembaga	20	22	120
		2.3.2 Informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna	%	100	100	100



2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang **tidak memenuhi** target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Sebagaimana tercantum pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 3 indikator yang tidak memenuhi target kinerja, meliputi indikator persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk, perekaman KTP el, dan kepemilikan KIA.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang telah **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Sebagaimana tercantum pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 9 indikator yang memenuhi target kinerja. Adapun indikator tersebut yaitu :

1. Nilai SAKIP
2. Nilai IKM Layanan Kependudukan
3. Kepemilikan KK
4. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil
5. Kepemilikan akta kelahiran 0- 18 thn.
6. Kepemilikan akta kematian.
7. Kepemilikan Akta perkawinan.
8. dengan Lembaga Femanfaatan Data.
9. Informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna.

2.1.4 Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sebagaimana tercantum pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat indikator yang melebihi target kinerja.

Tabel 2.4  
 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output/kegiatan) (output)	Target Capaian Kinerja - Rencana PD Tahun 2022 (Akhir Periode Rencana PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Rekrutasi Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Rencana PD Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Rencana PD s/d Tahun 2026		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=(9/8)*100	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.12.01	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	100 %	100	100%	100 %	100	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan realisasi kerja perangkat daerah yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	100	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	100	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Kinerja Realisasi Kerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kerja dan Kinerja Realisasi Kerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Kinerja Realisasi Kerja SKPD	3 laporan	4 laporan	4 laporan	100	3 dokumen	3 laporan	100	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 laporan	12 kali	12 kali	100	12 laporan	12 laporan	100	
2.12.01.2.02.01	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang	12 bulan	12 bulan	100	60 orang	60 orang	100	
2.12.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100	
2.12.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100	
2.12.01.2.03	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan pengawasan yang diterbitkan	3 jenis	100 %	20 %	20	3 jenis	3 jenis	100	
2.12.01.2.03.04	Produksi dan Pelaksanaan Tugas Berbasis Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berbasis Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 paket	10 orang	2 orang	20	3 paket	3 paket	100	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diterbitkan	10 mesin	7 jenis	7 jenis	100	10 mesin	10 mesin	100	

1	2	3	4	5	6	7/8/9/100	8	9	10/11/12/13	11
2.12.01.2.06.01	Peningkatan Kompetensi Instansi Lintas/Perangkat Perangkat Keras	Jumlah Paket Kompetensi Instansi Lintas/Perangkat Perangkat Keras yang Dibeberikan	5 paket	6 paket	6 paket	100		5 paket	100	
2.12.01.2.06.02	Peningkatan Perilaku dan Perilaku Kerja	Jumlah Paket Perilaku dan Perilaku Kerja yang Dibeberikan	3 paket	10 unit	10 unit	100		5 paket	100	
2.12.01.2.06.04	Peningkatan Hal-hal Logistik Lainnya yang Dibeberikan	Armbaly Paket Bahan Logistik Lainnya yang Dibeberikan	10 paket	26 paket	26 paket	100		10 paket	100	
2.12.01.2.06.05	Peningkatan Barang Cetak dan Pengalihan yang Dibeberikan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengalihan yang Dibeberikan	20 paket	5 paket	5 paket	100		20 paket	100	
2.12.01.2.06.06	Peningkatan Bahan Baku dan Peningkatan Perawatan dan Perawatan yang Dibeberikan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perawatan, Dokumen yang Dibeberikan	3 dokumen	7 paket	7 paket	100		5 dokumen	100	
2.12.01.2.06.09	Peningkatan Paket Kelembagaan dan Kelembagaan SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Paket Kelembagaan dan Kelembagaan SKPD	12 laporan	200 kali	200 kali	100		12 laporan	100	
2.12.01.2.06.10	Peningkatan Armbaly Transaksi pada SKPD	Jumlah Dokumen Penunjang Armbaly Transaksi pada SKPD	60 dokumen	10 armbaly	10 armbaly	0		50 dokumen	100	
2.12.01.2.07	Peningkatan Mula Mula (Mula Mula) Peningkatan Peningkatan Lainnya	Jumlah barang milik daerah yang Dibeberikan	1 unit	100 %	100 %	100		3 unit	100	
2.12.01.2.07.06	Peningkatan Perilaku dan Mula Mula Lainnya	Jumlah Unit Perilaku dan Mula Mula Lainnya yang Dibeberikan	10 unit	12 unit	12 unit	100		10 unit	100	
2.12.01.2.08	Peningkatan dan Peningkatan Lainnya	Jumlah laporan yang Dibeberikan	2 laporan	100 %	100 %	100		2 laporan	100	
2.12.01.2.08.01	Peningkatan dan Peningkatan Lainnya	Jumlah Laporan Perilaku dan Mula Mula Lainnya	12 laporan	2000 kali	2000 kali	75		12 laporan	100	
2.12.01.2.08.02	Peningkatan dan Peningkatan Lainnya	Jumlah Laporan Perilaku dan Mula Mula Lainnya	12 laporan	4 rekening	4 rekening	100		12 laporan	100	
2.12.01.2.08.04	Peningkatan dan Peningkatan Lainnya	Jumlah Laporan Perilaku dan Mula Mula Lainnya	12 laporan	6 orang	6 orang	100		12 laporan	100	
2.12.01.2.09	Peningkatan dan Peningkatan Lainnya	Jumlah barang milik daerah yang Dibeberikan	41 unit	100 %	74 %	74		41 unit	100	
2.12.01.2.09.02	Peningkatan dan Peningkatan Lainnya	Jumlah kendaraan dan spesifikasi lain lainnya yang Dibeberikan	81 unit	50 unit	45 unit	80		80 unit	100	
2.12.01.2.10	Peningkatan dan Peningkatan Lainnya	Jumlah Perilaku dan Mula Mula Lainnya yang Dibeberikan	20 unit	10 unit	10 unit	100		20 unit	100	
2.12.01.2.10.09	Peningkatan dan Peningkatan Lainnya	Jumlah Laporan Perilaku dan Mula Mula Lainnya yang Dibeberikan	3 laporan	12 unit	12 unit	100		3 laporan	100	
2.12.02	<b>PROGRAM FUNDATIF PERIODIK</b>	<b>Perawatan Perilaku dan Mula Mula</b>	<b>60 %</b>	<b>77 %</b>	<b>77 %</b>	<b>100</b>		<b>81%</b>	<b>100</b>	
2.12.02.2.01	Peningkatan Perilaku dan Mula Mula	Jumlah dokumen perolehan produk yang Dibeberikan	6000 dokumen	8200 dokumen	6120 dokumen	99,2507419		8300 dokumen	100	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Perilaku dan Mula Mula	Jumlah Laporan dan Perilaku dan Mula Mula Lainnya yang Dibeberikan	12 laporan	87 %	87 %	100		12 laporan	100	
2.12.02.2.01.05	Peningkatan Perilaku dan Mula Mula	Jumlah Dokumen Perilaku dan Mula Mula Lainnya yang Dibeberikan	31.000 dokumen	43000 dokumen	41750 dokumen	99,4047619		45000 dokumen	100	
2.12.02.2.01.07	Peningkatan Perilaku dan Mula Mula	Jumlah Laporan Perilaku dan Mula Mula Lainnya yang Dibeberikan	21.000 dokumen	21000 dokumen	19950 dokumen	94,97619048		21.000 dokumen	100	

1	2	3	4	5	6	7-8/9/10	8	9	10-11/12/13
2.12.02.2.03	Pengembangan Perilaku Pemilik	Keefektifan investasi dengan berbagai pemenuhan/nilai perusahaan terkait pemenuhan produktivitas dan perubahan penting pemenuh	12 buku	12 buku	12 buku	100	12 buku	12 buku	100
3.12.02.2.03.02	Pengajaran secara Aktif Penjualan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan secara Aktif Penjualan	10 dokumen	10 buku	10 buku	100	10 dokumen	10 dokumen	100
3.12.02.2.03.01	Pengajaran dan Perencanaan Penting terkait Penjualan	Peningkatan dan Perencanaan Penting terkait Penjualan	100 %	70 %	70 %	100	90%	100 %	100
3.12.03.2.01	Pengajaran dan Perencanaan Penting	Perubahan Perencanaan Sigit	2 buku	2 buku	2 buku	100	2	2 buku	100
3.12.03.2.01.01	Pengajaran dan Perencanaan Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan, Perencanaan, dan Perencanaan Dokumen dan Perencanaan Penting	1000 dokumen	1000 dokumen	1000 dokumen	97,89737664	1000 dokumen	10.000 dokumen	100
3.12.03.2.01.02	Pengajaran dan Perencanaan Penting	Jumlah Laporan Perencanaan Sigit yang Ditandatangani	100 %	87 %	87 %	100	100 %	100 %	100
3.12.03.2.02	Pengembangan Perilaku Sigit	Perilaku investasi dengan berbagai pemenuhan/nilai perusahaan terkait pemenuhan nilai dan pemenuhan penting	12 buku	12 buku	12 buku	100	12 laporan	12 buku	100
3.12.03.2.02.01	Pengajaran secara Aktif Penjualan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan secara Aktif Penjualan	12 laporan	12 buku	12 buku	100	12 laporan	12 laporan	100
3.12.03.2.02.02	Pengajaran dan Perencanaan Penting	Perencanaan dan Perencanaan Penting terkait Perencanaan Sigit	100 %	73 %	73 %	100	100 %	100 %	100
3.12.04.2.03	Pengembangan Perilaku Administrasi	Keefektifan pemenuhan pemenuhan, evaluasi, pemenuhan dan pemenuhan pemenuhan pemenuhan pemenuhan pemenuhan	1 buku	1 buku	1 buku	100	1 buku	1 buku	100
3.12.04.2.03.01	Pengajaran dan Perencanaan Penting	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perencanaan dan Perencanaan Perencanaan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	0	12 laporan	12 laporan	100
3.12.04.2.03.02	Pengajaran dan Perencanaan Penting	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Perencanaan Perencanaan	20 dokumen	10 buku	10 buku	100	20 dokumen	20 dokumen	100
3.12.04.2.04	Pengajaran dan Perencanaan Penting	Perencanaan dan Perencanaan Perencanaan	100 %	100 %	100 %	100	100%	100 %	100
3.12.04.2.04.01	Pengajaran dan Perencanaan Penting	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Perencanaan Perencanaan Perencanaan	12 laporan	12 buku	12 buku	100	12 laporan	12 laporan	100

Sebagai bentuk membahagiakan masyarakat telah dilakukan beberapa bentuk inovasi yang meliputi :

**Tabel. 2.5**  
**Bentuk Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEPANJANGAN</b>	<b>TAHUN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	PELITA HATI	Peduli Disabilitas Hadiri Sepenuh Hati	2020	Jebol
2	SIMPONI	Sistem Pendaftaran Online	2020	Digital
3	PDKT	Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi	2021	Desa
4	CITA SAMAWA	Cepat Inovatif Tepat Akurat Selesai Akad Memperoleh Akta Nikah dan Administrasi Kependudukan WNI	2021	KEMENAG
5	SEPEDIS	Sistem Informasi Terpadu Pengadilan Agama dan Disdukcapil	2021	PA Sumenep
6	SIPANDU	Sistem Informasi dan Pelayanan Terpadu	2021	PA Kangean
7	Melle Sagu	Melayani Lembur Sabtu Minggu	2021	UP Kec. Sapeken
8	Duta POS	Dokumen Kependudukan diantar melalui POS	2021	PT. POS, Persero
9	Ananda KITA	Anak lahir mendapatkan KK, KIA, AKTA	2022	RSI Garam Kalianget, RSUD SUMEKAR
10	SIAP LAHIR	Anak lahir mendapatkan KK, KIA, AKTA	2022	Dinas Kesehatan
11	CENDEKIA	Cepat Lindungi Anak dengan KIA	2022	Diknas
12	DERMAKA MILA	Demi santri dan mahasiswa kami melakukan jemput bola	2022	PONPES & PT
13	KANGMASE TIA	Kami datang masyarakat desa tersenyum bahagia	2022	jebol

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan capaian indikator perangkat daerah yang meliputi beberapa jenis yaitu :

- 1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.
- 2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah.
- 3 Indikator kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 4 Indikator kinerja pelaksanaan Sustainable Development Goal's di Bidang Kesehatan.
- 5 Indikator kinerja pelaksanaan Kabupaten Sehat.
- 6 Indikator kinerja pelaksanaan pencegahan dan penanganan Stunting.
- 7 Indikator kinerja pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- 8 Indikator kinerja pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat.
- 9 Indikator kinerja pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
- 10 Indikator kinerja pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **2.2.1 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah indikator kinerja dalam RPJMD yang merupakan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Sedangkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah adalah indikator kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan tidak terdapat dalam RPJMD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah wajib menjadi indikator dalam rencana strategis perangkat daerah.

Adapun capaian indikator kinerja dan indikator kinerja utama, sebagaimana tercantum pada tabel berikut;



**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Sumenep**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target/Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1	Nilai SAKIP		A	A	A	A	A	A	A	A	
2	IKM Pelayanan Kependudukan		83	83	83	83	84	87	83	83	
3	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk		77	81	85	89	93	75	81	85	
4	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil		79	90	100	100	100	94	90	100	
5	Persentase pemanfaatan data dan informasi kependudukan yang dikelola dengan baik		72	74	76	78	80	90	74	76	



2.2.2 Indikator kinerja pelaksanaan Sustainable Development Goal's di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sustainable Development Goal's (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goal's (MDG's) yang memiliki periode 15 tahun yaitu tahun 2000 – 2015. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat 17 tujuan yang harus dicapai oleh seluruh perangkat daerah terkait termasuk didalamnya Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena hal tersebut merupakan kesepakatan seluruh Negara pada tanggal 2 Agustus 2015 dan harus dicapai pada tahun 2030.

Adapun capaian indikator kinerja pelaksanaan Sustainable Development Goal's, sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
**Capaian Indikator SDG's**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR SDG's</b>	<b>CAPAIAN TAHUN 2022</b>
<b>A</b>	Tanpa Kemiskinan	
1	Presentase kepemilikan akta lahir	98,98%
2	Cakupan pelayanan dasar kepemilikan akta lahir	98,98%
3	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	98,98%

2.2.3 Indikator kinerja pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, maka diketahui terdapat 5 cluster indikator kabupaten layak anak yang diantaranya terkait dengan

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama cluster 1 yaitu Hak Sipil dan Kebebasan.

**Tabel 2.8**  
**Capaian Indikator RAD PG**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR RAD PG</b>	<b>CAPAIAN TAHUN 2022</b>
1	Persentase anak yang mendapatkan kutipan akta kelahiran	98,98%
2	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	47,26%

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu dan masalah mendesak dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep antara lain :

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman biometric dan memiliki dokumen kependudukan
2. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.
3. Kurangnya pemahaman tentang manfaat data kependudukan dalam pelayanan kepada masyarakat.
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan data dan informasi administrasi kependudukan.
5. Kurangnya pemahaman tentang manfaat data kependudukan dalam pelayanan kepada masyarakat.
6. Belum optimalnya kualitas SDM masyarakat.
7. Kurangnya prasarana penerbitan dokumen kependudukan diantaranya jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik terutama di wilayah kepulauan.
8. Kurangnya advokasi dan jalinan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta.

9. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaporan data kependudukan oleh masyarakat.

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengambil langkah solusi penyelesaian melalui hal-hal sebagai berikut :

- Perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk pamflet dan brosur, fungsionalisasi website yang ada, berisikan tentang pentingnya dokumen kependudukan dalam segala aspek pemenuhan kebutuhan hidup setiap orang ataupun setiap keluarga.
- Perlunya layanan mobil keliling langsung cetak dokumen dititik keramaian yang tidak terakomodir dengan wilayah UPTD.
- Supaya dilaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan dan memperhatikan sasaran yang dikunjungi dengan lebih selektif.
- Diperlukan penambahan UPTD untuk melaksanakan tugas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (khususnya daerah kepulauan).

Hal lain yang perlu dikemukakan melalui laporan ini bahwa telah dilakukan penjelasan dan evaluasi kepada seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan kebijakan pemerintah antara lain sebagai berikut :

- Semua penduduk wajib KTP dapat terekam biodatanya dan diharapkan memiliki fisik KTP-el.
- Menempatkan pusat-pusat layanan di UPTD, kecamatan dan di MPP (Mall Pelayanan Publik).
- Rencana strategis pada Tahun 2024 tentang program anak Indonesia memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 semua telah sesuai dengan indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD dan seluruhnya terakomodir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan usulan program dan kegiatan bagi masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2024 belum ada program dan kegiatan masyarakat.



**Tabel 2.9**  
**Revisi terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kabupaten Sumenep**

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					11.637.155.179,00	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					11.637.155.179,00
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					11.637.155.179,00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					11.637.155.179,00
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					11.637.155.179,00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					11.637.155.179,00
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>8.838.148.525,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>8.838.148.525,00</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.384.900,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.384.900,00
	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsakilik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.983.100,00		- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsakilik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.983.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
		- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsakilik, Semaun, Kertajaya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.428.100,00		- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsakilik, Semaun, Kertajaya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.428.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
		- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsakilik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsakilik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
		- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsakilik	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsakilik	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					
		- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsakilik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsakilik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD					
		- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsakilik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsakilik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsakilik	Jumlah Laporan Fasilitas Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.645.000,00		- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsakilik	Jumlah Laporan Fasilitas Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.645.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

NO	BARANGKAR AWAL BEPD				HASIL ANALISIS PERBUTUHAN						
	PROGRAM / SEGIANAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGAM / SEGIANAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	PELAKSANAAN DARI PEMANGKUNG JAWAB
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Penyelenggaraan Perangkitan Daerah	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah orang yang Menerima Gift dan Pengobatan ASH	10 orang/bulan	5.669.000.770,00	Administrasi Kelangkaan, Perangkitan Daerah	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah orang yang Menerima Gift dan Pengobatan ASH	10	5.669.000.770,00	DINAS KEPERIKAWANAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengobatan Gift dan Pengobatan ASH	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah orang yang Menerima Gift dan Pengobatan ASH	60 orang/bulan	5.669.000.000,00	Pengobatan Gift dan Pengobatan ASH	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah orang yang Menerima Gift dan Pengobatan ASH	60 orang/bulan	5.669.000.000,00	DINAS KEPERIKAWANAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Kontribusi dan Perawatan Logistik Kesehatan ASH Tahap II (P2)	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah Logistik Kesehatan ASH Tahap II (P2)	1 Logistik	2.729.840,00	Kontribusi dan Perawatan Logistik Kesehatan ASH Tahap II (P2)	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah Logistik Kesehatan ASH Tahap II (P2)	1 Logistik	2.729.840,00	DINAS KEPERIKAWANAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Koordinasi dan Perawatan Logistik Kesehatan ASH Tahap II (P2)	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah Logistik Kesehatan ASH Tahap II (P2)	12 Logistik	6.645.940,00	Koordinasi dan Perawatan Logistik Kesehatan ASH Tahap II (P2)	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah Logistik Kesehatan ASH Tahap II (P2)	12 Logistik	6.645.940,00	DINAS KEPERIKAWANAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Administrasi Kelangkaan Penyelidikan Jenebah	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah Penyelidikan Jenebah	1 Penyelidikan	30.000.000,00	Administrasi Kelangkaan Penyelidikan Jenebah	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah Penyelidikan Jenebah	1 Penyelidikan	30.000.000,00	DINAS KEPERIKAWANAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengelolaan Pelanggaran Denda Kesehatan ASH Tahap II (P2)	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah Pelanggaran Denda Kesehatan ASH Tahap II (P2)	100 Pelanggaran	35.000.000,00	Pengelolaan Pelanggaran Denda Kesehatan ASH Tahap II (P2)	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah Pelanggaran Denda Kesehatan ASH Tahap II (P2)	100 Pelanggaran	35.000.000,00	DINAS KEPERIKAWANAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Verifikasi dan Validasi Laporan Penyelidikan Tahap II (P2)	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah Laporan Penyelidikan Tahap II (P2)	10 Laporan	35.000.000,00	Verifikasi dan Validasi Laporan Penyelidikan Tahap II (P2)	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah Laporan Penyelidikan Tahap II (P2)	10 Laporan	35.000.000,00	DINAS KEPERIKAWANAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Administrasi Unitas Penyelidikan Daerah	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah Unitas Penyelidikan Daerah	2 Unitas	1.039.711.500,00	Administrasi Unitas Penyelidikan Daerah	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah Unitas Penyelidikan Daerah	2 Unitas	1.039.711.500,00	DINAS KEPERIKAWANAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengelolaan Kelangkaan Penyelidikan ASH Tahap II (P2)	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah Kelangkaan Penyelidikan ASH Tahap II (P2)	2 Kelangkaan	8.654.000,00	Pengelolaan Kelangkaan Penyelidikan ASH Tahap II (P2)	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah Kelangkaan Penyelidikan ASH Tahap II (P2)	2 Kelangkaan	8.654.000,00	DINAS KEPERIKAWANAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengelolaan Kelangkaan dan Pengobatan ASH Tahap II (P2)	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah Kelangkaan dan Pengobatan ASH Tahap II (P2)	10 Kelangkaan	8.23.700.770,00	Pengelolaan Kelangkaan dan Pengobatan ASH Tahap II (P2)	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah Kelangkaan dan Pengobatan ASH Tahap II (P2)	10 Kelangkaan	8.23.700.770,00	DINAS KEPERIKAWANAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengelolaan Kelangkaan dan Pengobatan ASH Tahap II (P2)	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah Kelangkaan dan Pengobatan ASH Tahap II (P2)	10 Kelangkaan	1.00.442.700,00	Pengelolaan Kelangkaan dan Pengobatan ASH Tahap II (P2)	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah Kelangkaan dan Pengobatan ASH Tahap II (P2)	10 Kelangkaan	1.00.442.700,00	DINAS KEPERIKAWANAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengelolaan Kelangkaan dan Pengobatan ASH Tahap II (P2)	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah Kelangkaan dan Pengobatan ASH Tahap II (P2)	3 Kelangkaan	30.000.000,00	Pengelolaan Kelangkaan dan Pengobatan ASH Tahap II (P2)	Kab. Sumatra, Kota Sumatra, Pangkep	Jumlah Kelangkaan dan Pengobatan ASH Tahap II (P2)	3 Kelangkaan	30.000.000,00	DINAS KEPERIKAWANAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	RANCANGAN AWAL RUPD				REVISI ANALISIS KEBUTUHAN				PERAKULY DAERAH PERANGKUNG JAWAB		
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		TARGET CAPAIAN	KERSTUAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Pakan Basah dan Pecutan Persekolahan (sidiolan)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Dukawan Pakan Basah dan Pecutan Persekolahan yang Disalurkan	12 Dukawan	80.804.192,00	Penyediaan Pakan Basah dan Pecutan Persekolahan	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Dukawan Pakan Basah dan Pecutan Persekolahan yang Disalurkan	12 Dukawan	80.804.192,00	DINAS KEPERINDAHAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengembangan Paket Kelembutan dan Fasilitas RUPD	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Laporan Pengembangan Paket Kelembutan dan Fasilitas (SKPD)	12 Laporan	265.788.000,00	Pengembangan Paket Kelembutan dan Fasilitas RUPD	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Laporan Pengembangan Paket Kelembutan dan Fasilitas (SKPD)	12 Laporan	265.788.000,00	DINAS KEPERINDAHAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Peningkatan Akses Timbunan pada SKPD	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Dukawan Peningkatan Akses Timbunan pada SKPD	50000 Dukawan	137.630.000,00	Peningkatan Akses Timbunan pada SKPD	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Dukawan Peningkatan Akses Timbunan pada SKPD	50000 Dukawan	137.630.000,00	DINAS KEPERINDAHAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengisian Bawang Putih Daerah Persekolahan	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Unit Persekolahan dan Menit (sarung) yang Disalurkan	47 Unit	797.053.262,00	Pengisian Bawang Putih Daerah Persekolahan	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Unit Persekolahan dan Menit (sarung) yang Disalurkan	47 Unit	797.053.262,00	DINAS KEPERINDAHAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan dan Persekolahan Uraian Persekolahan Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Laporan Persekolahan Daerah	12 Laporan	36.400.000,00	Penyediaan dan Persekolahan Uraian Persekolahan Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Laporan Persekolahan Daerah	12 Laporan	36.400.000,00	DINAS KEPERINDAHAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan dan Persekolahan Uraian Persekolahan Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Laporan Persekolahan Daerah	12 Laporan	36.400.000,00	Penyediaan dan Persekolahan Uraian Persekolahan Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Laporan Persekolahan Daerah	12 Laporan	36.400.000,00	DINAS KEPERINDAHAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan dan Persekolahan Uraian Persekolahan Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Laporan Persekolahan Daerah	12 Laporan	191.750.800,00	Penyediaan dan Persekolahan Uraian Persekolahan Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Laporan Persekolahan Daerah	12 Laporan	191.750.800,00	DINAS KEPERINDAHAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan dan Persekolahan Uraian Persekolahan Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Laporan Persekolahan Daerah	12 Laporan	78.680.187,50	Penyediaan dan Persekolahan Uraian Persekolahan Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Laporan Persekolahan Daerah	12 Laporan	78.680.187,50	DINAS KEPERINDAHAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan dan Persekolahan Uraian Persekolahan Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Laporan Persekolahan Daerah	12 Laporan	405.211.052,00	Penyediaan dan Persekolahan Uraian Persekolahan Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Laporan Persekolahan Daerah	12 Laporan	405.211.052,00	DINAS KEPERINDAHAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan dan Persekolahan Uraian Persekolahan Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Laporan Persekolahan Daerah	12 Laporan	203.860.000,00	Penyediaan dan Persekolahan Uraian Persekolahan Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Laporan Persekolahan Daerah	12 Laporan	203.860.000,00	DINAS KEPERINDAHAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan dan Persekolahan Uraian Persekolahan Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Laporan Persekolahan Daerah	12 Laporan	60.800.000,00	Penyediaan dan Persekolahan Uraian Persekolahan Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Laporan Persekolahan Daerah	12 Laporan	60.800.000,00	DINAS KEPERINDAHAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan dan Persekolahan Uraian Persekolahan Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Laporan Persekolahan Daerah	12 Laporan	1.30.053.262,00	Penyediaan dan Persekolahan Uraian Persekolahan Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	Jumlah Laporan Persekolahan Daerah	12 Laporan	1.30.053.262,00	DINAS KEPERINDAHAN DAN PENCATATAN SIPIL





NO	RANCANGAN AWAL RUPD					RANIL ANALISIS KEBUTUHAN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Pembelenggaraan Pencatatan Sipil					32.873.650,00	Pembelenggaraan Pencatatan Sipil					32.873.650,00	
	Pelayanan Secara Aktif Terhadap Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil						Pelayanan Secara Aktif Terhadap Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil						
	- Kab. Sumenep, Sentosa Kecamatan, Sentosa Kel/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Secara Aktif Pelaksanaan Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan		32.873.650,00		- Kab. Sumenep, Sentosa Kecamatan, Sentosa Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Secara Aktif Pelaksanaan Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	32.873.650,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>					<b>103.083.200,00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>					<b>103.083.200,00</b>	
	Pembelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					103.083.200,00	Pembelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					103.083.200,00	
	Pembelenggaraan Pemeliharaan Data Kependudukan						Pembelenggaraan Pemeliharaan Data Kependudukan						
	- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsckik	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pemeliharaan Data Kependudukan	5 Dokumen		27.576.300,00		- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsckik	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pemeliharaan Data Kependudukan	5 Dokumen	27.576.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	Sensitisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						Sensitisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
	- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsckik	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		22.028.000,00		- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsckik	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	22.028.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	Konsultasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat						Konsultasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat						
	- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsckik	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan		53.478.900,00		- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsckik	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	53.478.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>					<b>28.243.700,00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>					<b>28.243.700,00</b>	
	Penyusunan Profil Kependudukan					28.243.700,00	Penyusunan Profil Kependudukan					28.243.700,00	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota						Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota						
	- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsckik	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	800 Dokumen		28.243.700,00		- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsckik	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	800 Dokumen	28.243.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
						<b>11.627.155.179,00</b>						<b>11.627.155.179,00</b>	



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- a. Pelayanan publik;
- b. Perencanaan pembangunan;
- c. Alokasi anggaran;
- d. Pembangunan demokrasi; dan
- e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menentukan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodirnya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial.
- b. Meningkatkan cakupan pelayanan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).
- c. Mencetak dokumen di pusat-pusat layanan Mall Pelayanan Publik (MPP).
- d. Menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat.
- e. Memberikan data yang akurat kepada masyarakat serta terjalinnya kerjasama dengan lembaga pengguna data kependudukan.

Arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejalan dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 telah menentukan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Menjadikan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

- b. Menerbitkan identitas dan dokumen kependudukan dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pelayanan sosial lainnya.
- c. Pengembangan pusat data terpadu sebagai muara pengumpulan biodata penduduk dari hasil pendaftaran dan pencatatan kejadian vital.
- d. Pengembangan pusat-pusat layanan administrasi kependudukan yang dikenal dengan istilah Mall Pelayanan Publik (MPP).
- e. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan lembaga pengguna dalam meningkatkan pelayanan kependudukan.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan tahun yang akan datang guna menindaklanjuti program dan kegiatan tahun sebelumnya
2. Merancang program dan kegiatan baru berdasarkan permasalahan atau isu strategis yang ditemui pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
3. Memperkirakan kebutuhan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 3.1  
 Prioritas dan Sasaran Utama Keperawatan dan Penelitian Nipd Kabupaten Halmahera

NO	PRIORITAS	SASARAN DASAR	INDIKATOR SASARAN DASAR	SASARAN PERANGKAT DASAR	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DASAR
1	Meningkatkan mutu tingkat pelayanan yang berbasis dan adaptif	Meningkatkan Layanan Nipd yang berbasis Performance E-government	Rata-rata	Meningkatkan Mutu Mutu Pelayanan Nipd dan Peningkatan Nipd	Rata-rata

**Tabel 3.2**  
**Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep**

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2024
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	IKM Pelayanan Kependudukan	83

**Tabel 3.3**  
**Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep**

No	Sasaran PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2024
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	92

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Tahun 2024 mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, merencanakan 4 Program, 13 Kegiatan, dan 32 Sub Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep di Tahun 2024.





## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Tabel 4.1

#### Sasaran dan Program/Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep

No	Sasaran PD	Nama Program/Kegiatan
1	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	<b>Program :</b> Pendaftaran Penduduk <b>Kegiatan :</b> Pelayanan Pendaftaran Penduduk <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan. 2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan. 3. Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan.
		<b>Program :</b> Pendaftaran Penduduk <b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
		<b>Program :</b> Pendaftaran Penduduk <b>Kegiatan :</b> Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk
		<b>Program :</b> Pencatatan Sipil <b>Kegiatan :</b> Pelayanan Pencatatan Sipil <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan.
		<b>Program :</b> Pencatatan Sipil <b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Pencatatan Sipil <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa

		Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
		<b>Program :</b> Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan <b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan. 2. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.
		<b>Program :</b> Pengelolaan Profil Kependudukan <b>Kegiatan :</b> Penyusunan Profil Kependudukan <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

4.2 Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas Perangkat Daerah (PD), berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA direncanakan menjadi 7 kegiatan, adapun kegiatan-kegiatannya adalah yang mencakup operasional pelayanan rutin aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai penunjang kinerja aparatur dalam melayani masyarakat.
2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK direncanakan menjadi 3 kegiatan, adapun kegiatan-kegiatannya adalah yang mencakup

operasional pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Identitas Anak.

3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL direncanakan menjadi 2 kegiatan, adapun kegiatan-kegiatannya adalah yang mencakup operasional pelayanan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan Non Muslim, Akta Pembatalan Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengangkatan Anak, dan Akta Pengesahan Anak.
4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN direncanakan menjadi 1 kegiatan, adapun kegiatan-kegiatannya adalah yang mencakup Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN direncanakan 1 kegiatan yaitu Penyusunan Profil Kependudukan.

**Tabel 4.2**

**Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2024**

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
1.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang HARMONI dan Adaptif	<b>Program :</b> Pendaftaran Penduduk	55,000,000	
		<b>Kegiatan :</b> Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan.		
		2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan.	2,342,940,000	
		3. Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan.	80,100,000	
		<b>Program :</b> Pendaftaran Penduduk		
		<b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa	62,000,000	

		Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		
		<b>Program :</b> Pendaftaran Penduduk <b>Kegiatan :</b> Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	35,000,000	
		<b>Program :</b> Pencatatan Sipil <b>Kegiatan :</b> Pelayanan Pencatatan Sipil <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	59,766,100	
		<b>Program :</b> Pencatatan Sipil <b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Pencatatan Sipil <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	32,873,650	
		<b>Program :</b> Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan <b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan. 2. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. 3. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.	27,576,200 22,028,500 53,478,500	

		<b>Program :</b> Pengelolaan Profil Kependudukan <b>Kegiatan :</b> Penyusunan Profil Kependudukan <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	28,243,700	
--	--	---	------------	--



Tabel 4.1

## RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep

NO	KODE	URUSAN / SUB URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANJUK PERBODE	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAIRIBAN CAPAIAN TARGET RENJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU/INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROGRES		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					11.637.155.175,00							12.394.735.895,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.637.155.175,00							12.394.735.895,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					11.637.155.175,00							12.394.735.895,00		
1.	2.12.51	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNOTA					8.839.148.526,00							9.547.561.308,00		
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Pengoperasian, dan Tuntutan Kinerja Perangkat Daerah					19.354.900,00							21.320.300,00		
	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2.983.000,00	Kab. Sumenep Kota Sumenep Bangsal	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		PPF - Penugasan ke lembaga kementerian dan perangkat n kaitan pelayanan publik (ag) Masyarakat @ Jawa Timur Perangkat an Tata Kelola Pemerintahan yang harmonis dan adaptif	2 Dokumen	3.281.410,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	3.426.100,00	Kab. Sumenep Sema Kecamatan Sema Kalidesi	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		Perangkat an Tata Kelola Pemerintahan yang harmonis dan adaptif	1 Dokumen	3.776.010,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen		Kab. Sumenep Kota Sumenep Bangsal	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		PPF - Penugasan ke lembaga kementerian dan perangkat n kaitan pelayanan publik (ag) Masyarakat @ Jawa Timur Perangkat an Tata Kelola Pemerintahan yang harmonis dan adaptif	1 Dokumen			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan CPA-SKPD														
		Jumlah Dokumen CPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen CPA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen		Kab. Sumenep Kota Sumenep Bangsal	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		Perangkat an Tata Kelola Pemerintahan yang harmonis dan adaptif	1 Dokumen			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan CPA-SKPD														
		Jumlah Dokumen Perubahan CPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan CPA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen		Kab. Sumenep Kota Sumenep Bangsal	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		Perangkat an Tata Kelola Pemerintahan yang harmonis dan adaptif	1 Dokumen			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	3 Laporan		Kab. Sumenep Kota Sumenep Bangsal	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		PPF - Penugasan ke lembaga kementerian dan perangkat n kaitan pelayanan publik (ag) Masyarakat @ Jawa Timur Perangkat an Tata Kelola Pemerintahan yang harmonis dan adaptif	3 Laporan			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEDIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEDIATAN / SUB KELOMPOK	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN REJENI DPD	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET REJENI	CAPAIAN KERJA DAN KEBANGKAWANAN						RELOMPOK SABARAN	PENCAPAIAN BAKU BERSAMA		PEHANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			14	15	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Emisip Grogol Paranglul Daun	Laporan		Laporan	2 Laporan	2.845.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsari	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		PP7 - Peningkatan Kelembagaan, Keterampilan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan di Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis dan adaptif		2 Laporan	2.810.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Keuangan Paranglul Daun						5.888.905.750,00						60	5.280.846.427,00	
	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan	60 Orang/bulan	5.888.905.750,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsari	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		PP7 - Peningkatan Kelembagaan, Keterampilan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan di Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis dan adaptif		60 Orang/bulan	5.280.846.427,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyesuaian Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan AKHIR Tahun SKPD dan Laporan Hasil/Realisasi/ Perhitungan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	2.730.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsari	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		PP7 - Peningkatan Kelembagaan, Keterampilan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan di Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis dan adaptif		1 Laporan	3.010.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyesuaian Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Perhitungan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	5.925.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsari	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		PP7 - Peningkatan Kelembagaan, Keterampilan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan di Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis dan adaptif		12 Laporan	7.332.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah						90.000.000,00						110 Paket	90.000.000,00	
	2.12.01.2.06.02	Pengawasan Pakuan Dinas/Instansi di Bidang Kelangkaannya														
			Jumlah Paket Pakuan Dinas/Instansi Akibat Kelangkaannya	Paket		Paket	110 Paket	90.000.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsari	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan di Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis dan adaptif		110 Paket	90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.06.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Dilaksanakan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	10 Orang	30.000.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsari	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan di Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis dan adaptif		10 Orang	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.510.711.625,00						2 Paket	1.497.200.000,00	
	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komputer Instansi/Loket/Pelayanan Bangunan Faktor														
			Jumlah Paket Komputer Instansi/Loket/Pelayanan Bangunan Faktor yang Dibutuhkan	Paket		Paket	2 Paket	8.000.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsari	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan di Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis dan adaptif		2 Paket	10.416.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL





NO	KODE	URUSAN / BEANG URUSAN / PROGRAM / KESKATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD	PRAKORAN CAPAIAN TARGET REJUA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAGRAM BAKU RENCANA		PEMANGKAT DAERAH PERANGKUMS JAMAS	
							TARGET 2024	PADU INDIKATIF (%)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PADU INDIKATIF (%)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.12.01.2.06.10		Penyediaan Jasa Kesehatan: Dokter Desa Aa dan Lahir															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kesehatan: Sumber Daya Aa dan Lahir yang Dibayar	Laporan		Laporan	12 Laporan	751.763.850,00		Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Tata Kelola Pem- erintahan yang harmonis dan adaptif		12 Laporan	259.973.329,00	DIKAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	
2.12.01.2.06.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibayar	Laporan		Laporan	12 Laporan	78.600.150,00		Kab. Sumenep, Serus Kacambah, Serus Kallidasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Tata Kelola Pem- erintahan yang harmonis dan adaptif		12 Laporan	86.503.705,00	DIKAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	
2.12.01.2.06		Peningkatan Sarang MBI Daerah Perukung Usulan Peningkatan Daerah					826.211.052,00							41 Unit	448.832.157,00		
2.12.01.2.06.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan: Biaya Pemeliharaan, Pupuk dan Pelajaran Kesehatan: Dinas Operasional atau Lapangan															
		Jumlah Kesehatan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayar dan dibayarkan Pupuk dan Pelajarannya	Unit		Unit	41 Unit	225.846.000,00		Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Tata Kelola Pem- erintahan yang harmonis dan adaptif		41 Unit	225.846.000,00	DIKAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	
2.12.01.2.06.01		Peningkatan Perawatan dan Biaya Lainnya															
		Jumlah Perawatan dan Biaya Lainnya yang Dibayar	Unit		Unit	50 Unit	88.000.000,00		Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Tata Kelola Pem- erintahan yang harmonis dan adaptif		50 Unit	78.790.000,00	DIKAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	
2.12.01.2.06.06		Peningkatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipertahankan/Direnovasi	Unit		Unit	5 Unit	130.551.052,00		Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Tata Kelola Pem- erintahan yang harmonis dan adaptif		5 Unit	143.506.157,00	DIKAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	
<b>2.12.02</b>		<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>					<b>2.975.348.808,00</b>								<b>2.646.798.400,00</b>		
2.12.02.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk					2.478.040.000,00							10000	2.502.820.400,00		
2.12.02.01.01		Pelayanan Pendaftaran Non Perumahan dan Bertan Administrasi Kependudukan															
		Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk Non Perumahan dan Bertan Administrasi Kependudukan	Dokumen		Dokumen	10000 Dokumen	58.000.000,00		Kab. Sumenep, Serus Kacambah, Serus Kallidasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		PPF - Peningkatan Kelembagaan, Aksesibilitas Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmonis dan adaptif		10000 Dokumen	65.550.000,00	DIKAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	
2.12.02.01.02		Pencatatan, Pemeliharaan dan Penyaluran Dokumen Atas Pelayanan Perumahan Kependudukan															
		Jumlah Dokumen Pencatatan, Pemeliharaan dan Penyaluran Dokumen Atas Pelayanan Perumahan Kependudukan	Dokumen		Dokumen	45000 Dokumen	2.342.340.000,00		Kab. Sumenep, Serus Kacambah, Serus Kallidasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		PPF - Peningkatan Kelembagaan, Aksesibilitas Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmonis dan adaptif		45000 Dokumen	2.360.365.400,00	DIKAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	
2.12.02.01.03		Penyaluran Dokumen Atas Hasil Pelayanan Perumahan Kependudukan															
		Jumlah Laporan Penyaluran Dokumen Atas Hasil Pelayanan Perumahan Kependudukan	Laporan		Laporan	12 Laporan	81.100.000,00		Kab. Sumenep, Serus Kacambah, Serus Kallidasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		PPF - Peningkatan Kelembagaan, Aksesibilitas Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmonis dan adaptif		12 Laporan	81.901.000,00	DIKAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SUBPROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJET ANJUK PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENCANA ORG	CAPAIAN BERJILAH DAN KEANGKARAN PERANGKAP			REKOMFOR SASARAN	PENGALAMAN BERJILAH BERKALA		PERMINTAH DAERAH PEMANBUHANG JABAB
						TARGET 2024	LOKAS	JUMLAH DANA		MAKROKAL	PRESTASI DAERAH	
1	2	2.12.04.2.01.07	Penyusunan, difusi, dan Edukasi kepada Masyarakat, Peningkatan Kapasitas dan Masyarakat	5	0	1	1	11	12	13	18	17
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Injeksi, dan Edukasi kepada Masyarakat Masyarakat	1 Laporan	Laporan	Laporan	1 Laporan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	35.620.300.000.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PERKAWAHAN SIPIL
5	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PISIH, KEPENDEKULAN										
2	12.05.2.01	Penyusunan Profil & pendataan									21.000.000.000	
2	12.05.2.01.01	Penyusunan Data Kapasitas/kejuruteraan									21.000.000.000	
			Jumlah Data Injeksi/kejuruteraan (kapasitas/kejuruteraan)	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	31.000.000.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PERKAWAHAN SIPIL
											21.000.000.000	
											12.384.298.888.000	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2024 berisikan materi kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

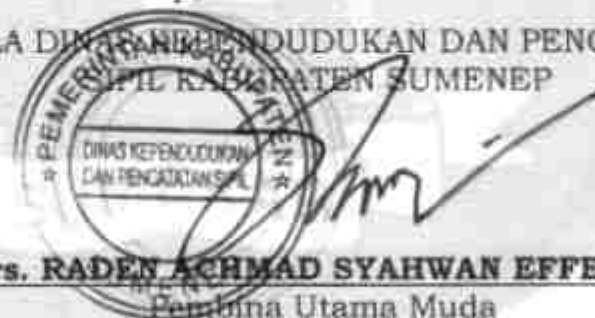
Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada tepat sasaran, tepat waktu dan berkualitas yang dapat memacu kinerja seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mencapai tujuan yang diharapkan selain itu dalam rangka Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2024 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.

Sumenep,

2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN SUMENEP



**Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670303 198809 1 001